

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Permasalahan.**

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan khususnya pada pendidikan untuk kaum perempuan yang masih tertinggal pendidikan formal sehingga tidak bisa membaca dan menulis, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar perempuan memperoleh pendidikan. Sebagai warga negara kaum perempuan berhak terhadap pendidikan formal dan non formal, dan tugas negara adalah membuat regulasi agar setiap warga negara memperoleh pendidikan.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan Nomor 17/Men.PP/Dep.II/V/2005, Nomor 28A 2005, dan Nomor 1/PB/2005, dalam Pasal (2) yang menyatakan bahwa, tujuan peraturan bersama ini untuk memberantas Buta Aksara Perempuan dalam upaya percepatan penurunan angka buta aksara melalui kebijakan khusus Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Pendidikan Nasional. Selanjutnya Pasal (4) menyebutkan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan ini , dilakukan melalui program Aksi Nasional Keaksaraan Fungsional yang diintegrasikan melalui program pendidikan Non Formal melalui magang, Kelompok Belajar

Keterampilan (KBK), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Kecakapan Hidup (*life skills*) dan sejenisnya dengan mempergunakan seperangkat modul/instrument pembelajaran di Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa.

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) pada pasal 5 ayat (1) bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memiliki pendidikan yang bermutu, dan ayat (5), bahwa setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayatnya. Dalam pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Riset dan Dikti menyatakan bahwa: pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan usia 15 tahun ke atas termasuk lanjut usia dalam meningkatkan kecakapan hidup, melalui upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan berbasis potensi lokal, dan sikap yang bermanfaat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik agar perempuan dapat berperan aktif dalam proses pembangunan keluarga, masyarakat dan bangsa.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak, melaksanakan program pendidikan berupa Kelompok Belajar Keterampilan (KBK). Kegiatan Pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia perempuan di Kota Pontianak berbentuk kegiatan pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya masyarakat yang ada di Kota Pontianak, agar para perempuan di Kota Pontianak dapat menambah keterampilan

dan menambah ekonomi keluarga, juga dapat menambah wawasan dibidang keterampilan dan supaya apa yang diberikan bisa berguna, dan dengan penyelenggaraan sumber daya manusia bisa menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dan peningkatan keterampilan pengolausahaan ekonomi keluarga khususnya untuk ibu rumah tanggayang terhitung perekonomiannya menengah kebawah dan dapat menjadi fasilitator dan motifator di Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) masing-masing sedangkan maksud diselenggarakannya acara kegiatan pelatihan keterampilan terhadap perempuan agar peserta pelatihan dapat tambahan ilmu pengetahuan sehingga mampu meningkatkan ekonomi dalam keluarga.

Usaha ekonomi keluarga merupakan wadah besar tenaga kerja dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilakukan untuk mencapai sasaran guna meningkatkan produktifitas dan efisiensi usaha keluarga sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat,tumbuhnya jiwa kewirausahaan dan meningkatkan keterampilan pengelolaan usaha keluarga serta meningkatkan kualitas kelembagaan dan kelompok usaha ekonomi keluarga.

Menurut hasil observasi telah ditemukan permasalahan penelitian bahwa tidak terlaksana secara optimal kegiatan pelatihan keterampilan yang merupakan program Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak, untuk menambah keterampilan dan menambah ekonomi keluarga di Kelurahan

Sungai Beliang. Tidak berjalannya kegiatan pelatihan keterampilan dalam program pemberdayaan perempuan, dikarenakan kurang terkoordinasinya program pemberdayaan perempuan antara Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak sebagai pihak yang mengkoordinir dengan Kelurahan Sungai Beliang yang sebagai pihak yang terkoordinir untuk melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan dalam program pemberdayaan perempuan. Dengan demikian lemahnya koordinasi horizontal antar badan (instansi) baik koordinasi melalui kewenangan, koordinasi melalui konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja, koordinasi melalui forum, koordinasi melalui konferensi sehingga gagal atau tidak berjalan optimal program pemberdayaan perempuan dalam Kegiatan Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Sungai Beliang, kegiatan ini merupakan salah satu program Badan Pemberdayaan Perempuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dengan menambah keterampilan dan menampai perekonomian keluarga sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga dari kecamatan sehingga turun ke kelurahan.

Pentingnya pelaksanaan dari program tersebut dikarenakan masih banyaknya perempuan yang membutuhkan pendidikan dibidang keterampilan untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan mengurangi tingkat kebutaaksaraan. Didaerah yang termasuk terbanyak dari empat kelurahan dari Kecamatan Pontianak Barat ini dengan jumlah penduduk 58.602 jiwa terdiri dari laki-laki 30.006 jiwa dan perempuan

28.596 jiwa, dengan jumlah 14.501 kepala keluarga dan jumlah perempuan yang tercatat sebagai kepala keluarga berjumlah 1.984 orang, dengan diketahui jumlah perempuan yang mengurus rumah tangga berjumlah 11.775 orang, sedangkan data perempuan yang tercatat belum atau tidak bekerja secara keseluruhan berjumlah 8.171 orang. Lebih dari setengah jumlah perempuan yang mengurus rumah tangga jumlah perempuan di kelurahan ini masih belum memiliki pekerjaan dan bisa dikatakan masih belum memiliki penghasilan sehingga belum bisa membantu perekonomian keluarga.

Jumlah perempuan yang tidak mengenyam pendidikan terhitung mulai dari usia sekolah dasar berjumlah 2.981 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah tamat SD yang berjumlah 5.300 jiwa, SMP berjumlah 4.468 jiwa, dan SMA berjumlah 7.152 jiwa. Dengan kondisi tersebut bahwa pendidikan perempuan memang masih sangat memprihatinkan karena dari data yang diketahui di daerah yang dekat perkotaan masih banyak perempuan yang masih tertinggal dalam pendidikan formal, sehingga tidak bisa membaca dan menulis. Dengan begitu jumlah perempuan yang tidak mengenyam pendidikan masih tinggi, ( Dikutip dari: Profil Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat 2013, 14 Maret 2014 ).

Ditinjau dari data yang ada bahwa kegiatan dari program Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak sangat diharapkan berjalan secara optimal karena dengan jumlah perempuan yang belum memiliki pekerjaan, belum

memiliki penghasilan sehingga belum bisa membantu perekonomian keluarga dan tidak mengenyam pendidikan formal masih tinggi maka masih mimimnya memberdayakan perempuan di daerah Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat. Berdasarkan hal tersebutlah menjadi dasar bagaimana pentingnya pembangunan pendidikan untuk kaum perempuan, sehingga dengan begitu pendidikan tidak hanya menjadi patokan untuk pembangunan kaum laki-laki saja bahkan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pembangunan dalam bidang pendidikan tersebut sehingga mampu meningkatkan perekonomian keluarga. Hal tersebutlah menjadi dasar penguat untuk penulis mengangkat masalah tersebut.

## **1.2 Identifikasi Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, adapun beberapa identifikasi permasalahan yang ditemukan, antara lain :

1. Tidak terlaksana secara optimal kegiatan dari program yang telah diberikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak.
2. Kurang terkoordinasinya antara Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak dengan Kelurahan Sungai beliang dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan.

### **1.3 Fokus Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka batasan masalah pada koordinasi horizontal dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat.

### **1.4 Rumusan permasalahan**

Perumusan masalah ini berfungsi untuk membatasi studi dan mengacu pada pelaksanaan penelitian secara subjektif terhadap objek penelitian. Selain itu perumusan masalah yang jelas, akan memenuhi kriteria untuk memasukan dan mengeluarkan data yang diperoleh dari objek penelitian. Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang peneliti tentukan, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah: “Mengapa koordinasi horizontal dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat tidak berjalan optimal?”

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis koordniasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dalam kegiatan pelatihan keterampilan, terdiri dari:

1. Koordinasi melalui kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak di Kelurahan Sungai Beliang

2. Koordinasi melalui konsensus Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianakdi Kelurahan Sungai Beliang
3. Koordinasi melalui pedoman kerjaBadan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianakdi Kelurahan Sungai Beliang
4. Koordinasi melalui forumBadan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianakdi Kelurahan Sungai Beliang
5. Koordinasi melalui konferensi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianakdi Kelurahan Sungai Beliang

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis yang ingin di hasilkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Melahirkan pemikiran ilmiah yang menyangkut tentang koordinasi horizontaldalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dalam pendidikan untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan mengurangi tingkat kebutaaksaraan.
2. Dapat menjadi referensi kajian ilmiah kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat Praktis yang ingin di hasilkan dalam penelitian ini yaitu “Memberikan arahan tentang koordinasi horizontal *inter-related* dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan agar berjalan secara optimal”.

UNIVERSITAS TANJUNGPURA